

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Triwulan Pertama Tahun 2026

- Pada Januari 2026 di Kota Palopo terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 4,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,02.
- Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Secara yoy, pada bulan Januari 2026 beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,10 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,90 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 12,59 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,45 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,29 persen; kelompok transportasi sebesar 0,76 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 0,06 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,69 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,84 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,79 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 12,84 persen.
- Tingkat inflasi month to month (mtm) Januari 2026 sebesar 0,37 persen dan tingkat inflasi tahun kalender/inflasi year to date (ytd) sebesar 0,37 persen.
- Pada Februari 2026 di Kota Palopo terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 5,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,55.
- Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Secara yoy, pada bulan Februari 2026 beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,64 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,90 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 15,52 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,20 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,26 persen; kelompok transportasi sebesar 0,74 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 0,09 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,45 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,84 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,83 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 14,17 persen.
- Pada Maret 2026 di Kota Palopo terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 2,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,77.
- Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Secara yoy, pada bulan Maret 2026 beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,54 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,33 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,54 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,16 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,21 persen; kelompok transportasi sebesar 1,13 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 0,09 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,39 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,84 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,01 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,67 persen.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2.

Sejalan dengan strategi 4 K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) program pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mana fokus utama pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan kedepan yaitu :

1. Memperkuat sinergi pengendalian dengan mendorong kerjasama perdagangan antar daerah yang surplus dengan daerah yang minus produksi;
2. Pengaturan pola tanam dengan memanfaatkan informasi cuaca dari BMKG;
3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur irigasi (bendungan dan jaringan irigasi) untuk memperkuat produksi pertanian;
4. Peningkatan kualitas jalan untuk akses konektivitas dari sentra produksi ke sentra perdagangan, untuk mendorong kelancaran distribusi barang, mengurangi biaya transportasi dan memangkas rantai pasokan/margin pasar;
5. Pembangunan fasilitas logistik (gudang dan RPC), agar kelebihan stok pada saat panen raya setelah diproses dapat disimpan sebagai cadangan pangan dan sewaktu-waktu dapat dikirim kedaerah lain yang memerlukan;
6. Perkuatan Lembaga Poktan, Gapoktan maupun Bumdes;
7. Diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang pola tataniaga produk pertanian;
8. Penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi, jaringan listrik untuk wilayah terpencil;
9. Penyediaan bibit unggul yang tahan hama dan tahan terhadap cuaca ekstrim;
10. Membuka akses yang seluas-luasnya untuk petani dan UMKM terhadap lembaga keuangan;

Mendorong Lembaga Keuangan yang ada di daerah untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pengendalian inflasi, dengan memanfaatkan dana CSRnya

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Tim Pengendalian inflasi Daerah dalam menghadapi gejolak kenaikan harga khususnya pada komoditi sektor pertanian, ketahanan pangan dan perikanan. Dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Program Pemerintah Makan Bergisi Gratis (MBG) Tim PID Kabupaten Luwu Telah melakukan berbagai kegiatan pengendalian dan penguatan pada berbagai bidang sebagaimana strategi program pengendalian inflasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Luwu, antara lain:

1. Keterjangkauan harga

- Pemantauan harga barang dan informasi pasar. yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Tim PID Kab Luwu
- Pelaksanaan pasar murah dan GPM Oleh OPD terkait dan TIM PID Kab Luwu
- Pengawasan barang beredar yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.
- Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan oleh Opd Terkait.

2. Ketersediaan pasokan

Memperluas gerakan tanam dengan menysasar komoditas utama seperti cabe, tomat, kangkung, bawang merah dll.

- Pembentukan Badan Usaha Milik Petani.
- Pelaksanaan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitara usaha.
- Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan.
- Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani
- Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil.

3. Kelancaran distribusi

- Memfasilitasi kerksi Kerjasama Antar Daerah (KAD) .
- Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota.
- Menciptakan pasar tertib ukur.
- Pembangunan/rehabilitasi pasar rakyat.
- Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan.
- Pembangunan/rehabilitasi prasana pertanian.
- Penyediaan infrastruktur lumbung pangan.

4. Komunikasi efektif

- Melakukan pemantauan harga dan stok pasokan bahan makanan secara berkala.
- Penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan.
- Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan.
- Implementasi komunikasi yang efektif melalui kegiatan bersama siaran pers.
- Kerjasama dengan tokoh masyarakat serta ibu rumah tangga dalam upaya edukasi terkait pengendalian inflasi.
- Pembuatan materi publikasi dan diseminasi melalui media terkait pentingnya pengendalian inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan pengendalian Inflasi di Kabupaten Luwu pada Triwulan I 2026 adalah

1. Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan koordinasi dengan TPID Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi pangan di Kabupaten Luwu;
2. Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang Tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi devisit pangan di masing-masing daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian Inflasi di Kabupaten Luwu pada Triwulan I 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan serta kelancaran distribusi yang berkelanjutan;
 2. Melakukan program integrasi pertanian terpadu secara berkesinambungan untuk
-

meningkatkan produksi pangan;

3. Melanjutkan dan meningkatkan koordinasi antar anggota TPID menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga;
4. Dalam mengantisipasi Gejolak harga dengan adanya Program Pemerintah Makan Bergisi Gratis (MBG) Pemerintah Kabupaten Luwu tetap memantau dan memonitoring serta mempertahankan ketersediaan pangan, kelancaran distribus, kestabilan harga dan komunikasi yang efektif.
5. Menggalakkan kegiatan pemanfaatan halaman, pekarangan kantor dan rumah tangga dalam kegiatan produksi komoditas penyumbang inflasi terutama sayuran untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
6. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga termasuk peran TNI dan Polri serta Kejaksaan dalam pengendalian inflasi.